



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA
2020

KATA PENGANTAR

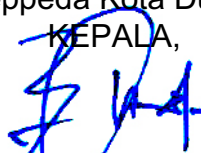
Alhamdulillah, segala puji hanya bagi ALLAH SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya perumusan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2020 dapat disusun dengan baik.

Renja Bappeda Tahun 2020 ini disusun mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis di bidang perencanaan pembangunan, capaian pelayanan Bappeda tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Bappeda, strategi dan arah kebijakan jangka menengah dalam mencapai tolak ukur keberhasilan pelayanan Bappeda, serta program dan kegiatan prioritas untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Dumai Tahun 2016-2021.

Dokumen Renja Bappeda Tahun 2020 ini selaras dengan Dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2020, dalam rangka mendukung pencapaian Renstra Bappeda serta Misi Keempat RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 “Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan” khususnya di bidang perencanaan pembangunan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya dokumen Ranwal Renja ini, terutama kepada seluruh pegawai Bappeda yang telah berkoordinasi dengan baik sehingga seluruh tahapan penyusunan dokumen ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Dumai, Juni 2019
Beppeda Kota Dumai
KEPALA,



MUHAMMAD SYAFIE, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650122 199903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Tahun 2016-2021	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda	14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	26
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	38
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	39
3.3. Program dan Kegiatan	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	43
BAB V PENUTUP	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2019	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai	15
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2018	18
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Dumai Tahun 2020	29
Tabel 3.1	Visi, Misi, Target Tujuan dan Sasaran 2020	40
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan	40
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 Dan Prakiraan Maju Tahun 2021	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020	2
------------	-------------------------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

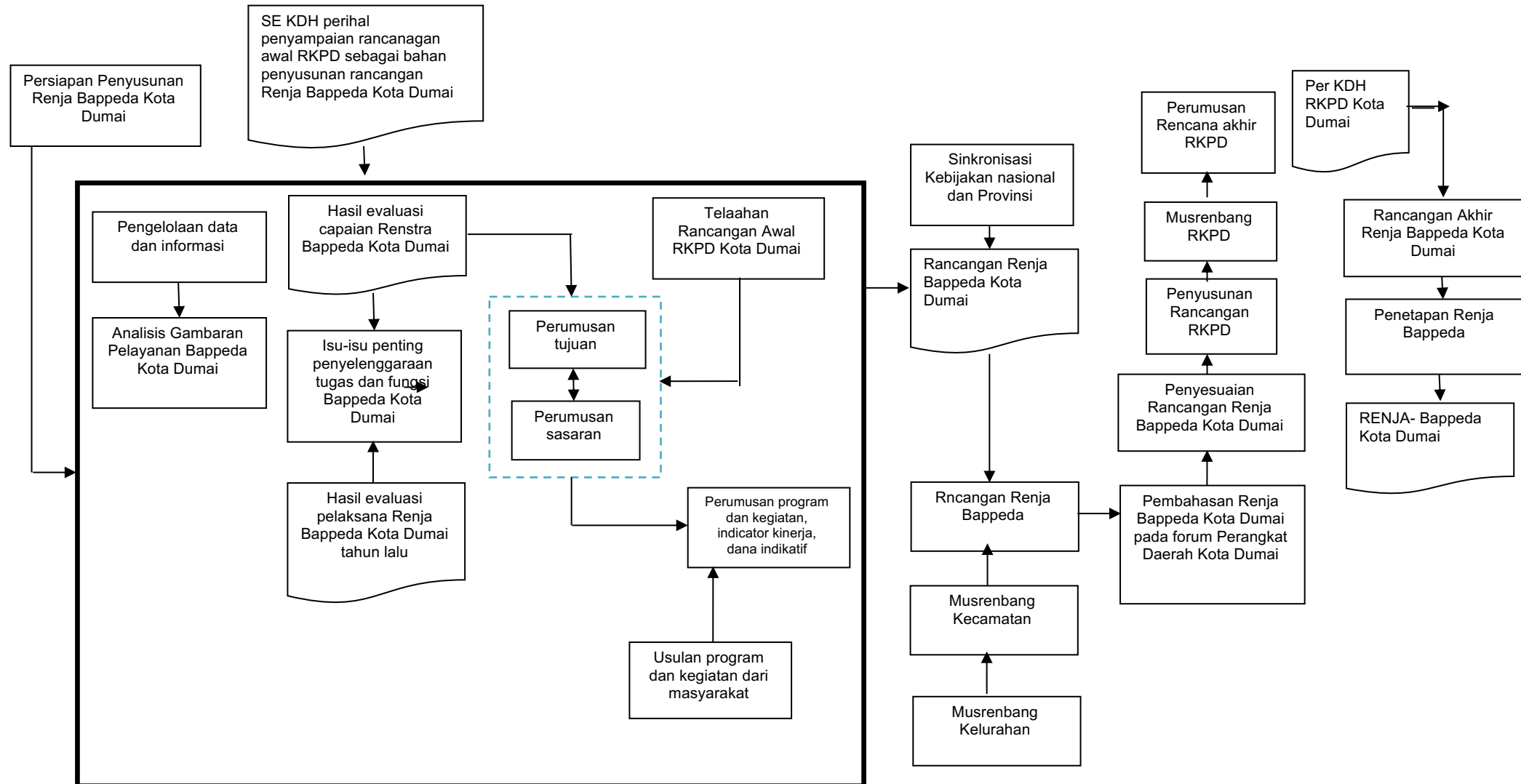
Sesuai amanat Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja). Dokumen tersebut merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai sebagai salah satu Perangkat Daerah, memiliki tanggungjawab membantu Kepala Daerah melalui tugas pokok dan fungsi dalam bidang perencanaan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 - 2021. Penjabaran visi dan misi tersebut disusun dalam dokumen Renstra Bappeda Kota Dumai tahun 2016 - 2021 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Bappeda untuk mencapai misi dan indikator kinerja utama Kepala Daerah, serta untuk menangani isu strategis pelayanan Bappeda Kota Dumai.

Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2020, perlu disusun untuk menjabarkan prioritas dan target dari setiap program dan kegiatan Tahun 2020 yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kota Dumai Tahun 2016 - 2021, dan memperhatikan Renja Provinsi Riau serta Bappenas. Selanjutnya Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2020 menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran kegiatan Bappeda Kota Dumai Tahun 2020.

Berikut bagan alir proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 :

Gambar 1.1
 Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 104, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
9. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun 2014 - 2019;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016 - 2021;
19. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);

20. Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 23 seri D);
21. Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 32 seri E);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2020 adalah memberikan arah bagi secretariat dan bidang-bidang di Bappeda Kota Dumai dalam pencapaian program/kegiatan Bappeda Kota Dumai tahun 2020 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang diamanatkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2020 adalah mewujudkan rencana kerja tahunan yang konsisten, implementatif, dan menjadi tolok ukur penilaian kinerja, untuk mencapai harmonisasi perencanaan Bappeda Kota Dumai pada tahun 2020.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 1.4. Review Rancangan Awal RKPD.
- 1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2016-2021

Adapun evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2019
Sumber : Bappeda Kota Dumai 2019

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET RPJMD KOTA DUMAI PADA TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2017	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2019	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI TAHUN 2019	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
Program Perencanaan Tata Ruang	Jumah dokumen tata ruang	Dokumen	8	1	1	1	100%	2	4	50%
Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Terlaksananya Koordinasi tentang rencana tata ruang	Kali	80	15	20	20	100%	15	50	63%
Survey dan pemetaan	Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial permukiman	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
Program Pengembangan Perumahan	Persentase kualitas perumahan dan permukiman	Persentase	100	100	100	100	100%	100	300	60%
Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Jumlah dokumen Ranperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh Kota Dumai	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA										
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	Dokumen	5	1	100%	1	100%	1	3	60%
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Jumlah dokumen	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN										
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	Persentase	100	100	100	100	100%	100	300	60%
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	jumlah / Bulan	60	12	12	12	100%	12	36	60%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian jaringan komunikasi	Bulan	37	7				6	13	35%
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah partisipasi Bappeda dalam pameran Dumai Expo	Kali	3	1	1	1	100%		2	67%

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET RPJMD KOTA DUMAI PADA TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2017	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2019	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI TAHUN 2019	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kelengkapan administrasi kendaraan dinas	Unit	27					25	25	31%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	Bulan	60	12	12	12	100%	12	36	60%
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Unit	104	5	5	5	100%	93	103	20%
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	60	12	12	12	100%	12	36	60%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Bulan	60	12	12	12	100%	12	36	60%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik kantor	Bulan	60	12	12	12	100%	12	36	60%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan tentang perundang-undangan	Bulan/jenis	60	12	12	12	100%	12	36	60%
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu, rapat serta harian	Bulan	60	12	12	12	100%	12	36	60%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Bulan	60	12	12	12	100%	12	36	60%
Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	Bulan/orang	60	12	12	12	100%	12	36	60%
Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	Terbayarnya pembayaran honor jasa administrasi perkantoran	bulan / orang	60	12	12	12	100%	12	36	60%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase	100	100	100	100	100%	100	300	60%
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Unit	2					1	1	50%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Unit	129	8				26	34	26%
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan sarana dan prasarana untuk aparatur BAPPEDA	Unit	92	1	1	3	300%	19	23	25%
Pengadaan mebeleur	Jumlah penyediaan meubeleur kantor	Paket	1		1	1	100%		1	100%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara berkala	Unit	3	1	1	3	300%	2	6	40%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Kendaraan	27	24	24	24	100%	25	73	54%

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET RPJMD KOTA DUMAI PADA TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2017	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2019	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI TAHUN 2019	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	orang	59		7	8	114%	10	18	6%
Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	orang	59		7	8	114%		8	3%
Pembinaan mental dan fisik aparatur	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani	bulan	36					12	12	33%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	Dokumen	21	3	3	6	200%	5	14	67%
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	13	2	2	4	200%	3	9	69%
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	8	1	1	2	200%	2	5	63%
Program pengembangan data/informasi	Persentase peningkatan data dan informasi terhadap pembangunan daerah	Persentase	90	50	60	60	100%	70	180	40%
Penyusunan profile daerah	Jumlah dokumen informasi tentang statistik Kota Dumai	Dokumen	2	1	1	1	100%		2	100%
Sistem informasi perencanaan daerah	Jumlah aplikasi yang terinput	Aplikasi	2	2	2	2	100%	3	7	70%
Penyusunan data perencanaan daerah	Jumlah laporan SIPD	Laporan	3					1	1	33%
Program Kerjasama Pembangunan	Persentase peningkatan kerjasama pembangunan daerah	Persentase	80	40	50	50	100%	60	150	38%
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah	Bulan	60	12	12	12	100%	12	36	60%
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%
Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	Dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPBD Provinsi Riau dan BNPP Pusat	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Dokumen	23	4	4	4	100%	3	11	48%
	Proporsi usulan masyarakat bidang infrastrukturnya	Persentase	35	15	20	10,2	51%	20	45,2	26%

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET RPJMD KOTA DUMAI PADA TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2017	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2019	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI TAHUN 2019	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	kewilayahan yang diakomodir dalam RKPD									
Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	Terlaksananya koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi	Kali	41	6	6	6	100%	9	21	51%
Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan Nasional-Provinsi-Kab./Kota di bidang perekonomian	Bulan	60	12	12	12	100%	12	36	60%
Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	Tersusunnya dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Tercapainya dokumen perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi yang di Kota Dumai	Dokumen	10	2	2	2	100%	1	5	50%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen dan data-data hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik sarana dan prasarana	Dokumen	5	1	1	1	c	1	3	60%
Koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	Jumlah Koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	kali	29					9	9	31%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	Dokumen	61	10	12	11	92%	11	32	52%
	Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	Persentase	35	15	20	15,1	76%	25	55,1	31%
	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	12	3	3	3	100%	2	8	67%
	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	Persentase	100	100	100	100	100%	100	300	60%
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Terlaksananya forum OPD	Forum	5	1	1	1	100%	1	3	60%
Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah Dokumen RPJMD	Dokumen	3	1					1	33%
Penetapan RPJMD	Tersedianya dokumen RPJMD dan Perubahan RPJMD	Dokumen	2		1	1	100%		1	50%
Penyusunan rancangan RKPD	Tersusunnya dokumen RKPD dan dokumen Perubahan RKPD	Dokumen	10	2	2	2	100%	2	6	60%

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET RPJMD KOTA DUMAI PADA TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2017	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2019	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI TAHUN 2019	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional Tahun 2019	Kali	15	3	3	3	100%	3	9	60%
Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Jumlah Lakip yang disusun dan disampaikan ke kemandagri dan pemerintah provinsi	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%
Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen evaluasi RKPD	Dokumen	23	4	4	4	100%	4	12	52%
Bimbingan teknis evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	Kali	4		1	1	100%		1	25%
Evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD-PK) Dumai	Jumlah dokumen pelaporan RAD-PK	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%
Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s	Dokumen	4		1	1	100%	1	2	50%
Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Jumlah Dokumen pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Dokumen	4					1	1	25%
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi	Dokumen	10	2	2	2	100%	2	6	60%
	Proporsi usulan masyarakat bidang ekonomi yang diakomodir dalam RKPD	Persentase	35	15	20	28,5	143%	25	68,5	39%
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen	Dokumen	26	2	6	6	100%	5	13	50%

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET RPJMD KOTA DUMAI PADA TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2017	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2019	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2018	REALISASI RENJA PD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI TAHUN 2019	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	perencanaan bidang sosial budaya									
	Proporsi usulan masyarakat bidang sosial dan budaya yang diakomodir dalam RKPD	Persentase	35	15	20	19,5	98%	20	54,5	31%
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya	Dokumen	7	2	1	1	100%	1	4	57%
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	Jumlah dokumen Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur pemerintahan	Jumlah dokumen Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur pemerintahan	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%
Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang agama, sosial dan kebudayaan	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	Dokumen	4		1	1	100%	1	2	50%
Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan	Persentase	90					90	90	33%
Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah dan informasi hari-hari besar nasional/daerah/keagamaan	Persentase penyediaan informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan	Persentase	90					90	90	33%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase peningkatan serapan realisasi anggaran Kota Dumai	Persentase	95					80	80	28%
Evaluasi realisasi anggaran	Jumlah dokumen TEPRA yang disusun	Dokumen	12					4	4	33%
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	Persentase	90					90	90	33%
Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	Persentase	90					90	90	33%

Tahun 2019 merupakan tahun ke tiga dari priodesasi RPJMD Kota Dumai 2016 – 2021, dengan demikian diharapkan pada tahun 2019 pencapaian Renstra sudah diatas 50 %. Dari data diatas, terhadap pencapaian target pada tahun akhir RPJMD 2021, untuk tahun 2019 pencapaian yang telah 100 % ada sebanyak 2 kegiatan, hal ini disebabkan karena penyelesaian kegiatan dimaksud hanya selama 2 tahun anggaran dan berakhir sampai dengan tahun 2018, sedangkan kegiatan yang lainnya adalah sebagai berikut :

- Pencapaian 100 % : 2 Kegiatan
- Pencapaian berkisar dari 50 % s/d <100 % : 55 Kegiatan
- Pencapaian <50 % : 27 Kegiatan

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPEDA

Bappeda Kota Dumai telah menyelenggarakan pelayanan dibidang perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna. Penetapan indikator kinerja dirumuskan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan indikator-indikator kinerja tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai
Sumber: BAPPEDA, 2019

No.	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Tahun 2018	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD				20%	25%	30%	35%	15,1 %	25%	30%	
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA				3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
3.	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD				100%	100%	100%	100%	96,61%	100%	100%	

Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk capaian tahun 2018 seluruh indikator kinerja sudah terealisasi 100 % sesuai dengan target yang ditetapkan, sedangkan untuk realisasi capaian tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD terakomodir sebanyak 15,1% dari yang ditargetkan 20%, dimana dari 1.508 usulan masyarakat pada Musrenbang, yang diakomodir kedalam RKPD 2019 berjumlah 228 usulan.
2. Indikator Tersedianya Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada, target 2018 adalah tersedianya 3 Dokumen, ketiga dokumen tersebut, yakni :
 - 2.3. Dokumen Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021;
 - 2.3. Dokumen Peraturan Walikota Dumai Nomor 40 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2019 (Berita Daerah 24 Seri E), dan;
 - 2.3. Dokumen Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang perubahan RKPD Tahun 2018 (Berita Daerah 26 Seri E).
3. Indikator Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD, target 2018 adalah 100%, target ini terealisasi 96,61%, dari 177 program yang terdapat dalam RPJMD Kota Dumai 2016 – 2021, hanya 171 program saja yang masuk kedalam RKPD Kota Dumai Tahun 2019.

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018 sebagai berikut :

Jumlah Program	: 14 Program
Jumlah Kegiatan	: 49 Kegiatan
Total Pagu	: Rp. 12.737.940.389,83
• Belanja Tidak Langsung	: Rp. 3.734.977.010,-
• Belanja Langsung	: Rp. 9.002.963.379,83

Realisasi Keuangan :

- Total Serapan Keuangan : Rp. 10.914.854,668,- (85,69%)
- Serapan Belanja Tidak Langsung : Rp. 3.721.428.014,- (99,64%)
- Serapan Belanja Langsung : Rp. 7.193.426.654,- (79,90%)

Total Realisasi Fisik : 95,48

Realisasi Kegiatan :

- Selesai 100 % : 45 Kegiatan
- < 100 % : 4 Kegiatan

Selanjutnya rincian capaian target pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2018
 Sumber: BAPPEDA, 2019

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU (Rp.)	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp.)	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Program Perencanaan Tata Ruang	Jumah dokumen tata ruang	1 Dokumen	414.483.780	1 Dokumen	293.900.350	1. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Jumlah koordinasi tentang rencana tata ruang	20 Kali	276.397.490	20 Kali	156.678.720
						2. Survey dan pemetaan	Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial permukiman	1 Dokumen	138.086.290	1 Dokumen	137.221.630
2. Program Pengembangan Perumahan	Persentase kualitas perumahan dan permukiman	100%	200.000.000	100%	195.772.650	1. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Jumlah dokumen tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh Kota Dumai	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	195.772.650
3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 Dokumen	251.423.000	1 Dokumen	205.879.228	1. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 Dokumen	251.423.000	1 Dokumen	205.879.228
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	100%	1.919.792.001	100%	1.827.031.438	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan surat menyurat	12 Bulan	3.600.000	12 Bulan	1.800.000
						2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah partisipasi Bappeda dalam pameran Dumai Expo	1 Kali	71.200.000	1 Kali	64.200.000

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU (Rp.)	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp.)	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	116.404.500	12 Bulan	115.417.400
						4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	5 Unit	44.350.000	5 Unit	39.738.000
						5. Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	193.779.926	12 Bulan	193.779.200
						6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	55.104.000	12 Bulan	54.817.200
						7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	12 Bulan	23.586.000	12 Bulan	23.586.000
						8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan tentang perundang-undangan	12 Bulan	26.276.000	12 Bulan	25.990.000
						9. Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	12 Bulan	85.189.500	12 Bulan	53.337.000
						10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	640.000.000	12 Bulan	612.084.638

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU (Rp.)	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp.)	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						11. Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	12 Bulan	124.250.075	12 Bulan	124.250.000
						12. Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	536.052.000	12 Bulan	518.032.000
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	948.104.000	100%	682.508.691	1. Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	1 Unit	109.620.000	3 Unit	70.999.000
						2. Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur kantor	1 Paket	35.720.000	1 Paket	30.720.200
						3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	3 Unit	414.000.000	3 Unit	278.684.600
						4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	24 Kendaraan	388.764.000	24 Kendaraan	302.104.891
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	7 Orang	24.000.000	8 Orang	5.000.000	1. Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	7 Orang	24.000.000	8 Orang	5.000.000
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	3 Dokumen	36.600.000	6 Dokumen	36.600.000	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	2 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	15.000.000
						2. Penyusunan pelaporan	Jumlah dokumen pelaporan	1 Dokumen	21.600.000	2 Dokumen	21.600.000

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU (Rp.)	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp.)	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						keuangan akhir tahun	laporan keuangan					
8.	Program pengembangan data/informasi	Persentase peningkatan data dan informasi terhadap pembangunan daerah	60%	420.000.000	60%	213.966.748	1. Penyusunan profile daerah	Jumlah dokumen SIPD Kota Dumai	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	74.631.448
							2. Sistem informasi perencanaan daerah	Jumlah aplikasi yang digunakan	2 Aplikasi	300.000.000	2 Aplikasi	139.335.300
9.	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase peningkatan kerjasama pembangunan daerah	50%	247.899.400	50%	149.780.300	1. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah	12 Bulan	247.899.400	12 Bulan	149.780.300
10	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan	1 Dokumen	101.259.370	1 Dokumen	100.994.193	1. Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	Jumlah Dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPBD Provinsi Riau dan BNPP Pusat	1 Dokumen	101.259.370	1 Dokumen	100.994.193
11	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	1. Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	4 Dokumen	831.999.900	4 Dokumen	740.884.988	1. Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	Jumlah koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi	6 Kali	76.450.000	6 Kali	76.028.200
		2. Proporsi usulan masyarakat bidang infrastruktur dan kewilayahan	20%		10,2%		2. Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Jumlah koordinasi terkait perencanaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	12 Bulan	132.843.050	12 Bulan	127.554.991

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU (Rp.)	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp.)	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	yang diakomodir dalam RKPD					3. Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	Jumlah dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri	1 Dokumen	199.500.000	1 Dokumen	169.540.401
						4. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi Kota Dumai yang disusun	2 Dokumen	295.278.300	2 Dokumen	239.880.796
						5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik sarana dan prasarana	1 Dokumen	127.928.550	1 Dokumen	127.880.600
12	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	11 Dokumen	2.448.761.000	11 Dokumen	1.788.750.702	1. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah forum OPD yang dilaksanakan	1 Forum	1 Forum	130.590.000
		2. Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	20%		15,1%		2. Penetapan RPJMD	Jumlah Dokumen RPJMD/ Perubahan RPJMD Kota Dumai yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	1 Dokumen	1 Dokumen	347.610.757

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU (Rp.)	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp.)	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3. Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKA DA	3 Dokumen		3 Dokumen		3. Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD dan dokumen perubahan RKPD yang disusun	2 Dokumen	242.920.000	2 Dokumen	235.558.900
	4. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%		100%		4. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional	3 Kali	282.720.000	3 Kali	244.359.100
						5. Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Jumlah Dokumen LKJIP yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	199.586.000	1 Dokumen	180.213.415
						6. Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu	1 Dokumen	249.405.000	1 Dokumen	237.241.769
						7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen evaluasi RKPD	4 Dokumen	184.465.000	4 Dokumen	132.210.000
						8. Bimbingan teknis evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	1 Kali	170.000.000	1 Kali	94.765.861

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU (Rp.)	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp.)	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						9. Evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD-PK) Dumai	Jumlah dokumen pelaporan RAD-PK	1 Dokumen	226.610.000	1 Dokumen	38.346.700
						10. Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s	1 Dokumen	237.000.000	1 Dokumen	147.854.200
13	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1. Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi	294.460.700	2 Dokumen	248.387.766	1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 Dokumen	187.223.700	1 Dokumen	172.350.766
		2. Proporsi usulan masyarakat bidang ekonomi yang diakomodir dalam RKPD		20%		28,5%	2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi hasil perencanaan ekonomi	1 Dokumen	107.237.000	1 Dokumen
14	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	1. Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya	864.180.229	6 Dokumen	703.969.600	1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1 Dokumen	192.312.000	1 Dokumen	182.488.600
							2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya	1 Dokumen	137.824.400	1 Dokumen

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PAGU (Rp.)	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp.)	CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2. Proporsi usulan masyarakat bidang sosial dan budaya yang diakomodir dalam RKPD	20%		19,5%		3. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	1 Dokumen	185.640.000	1 Dokumen	177.957.100
						4. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur pemerintahan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur	1 Dokumen	181.240.000	1 Dokumen	172.833.900
						5. Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang agama, sosial dan kebudayaan	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	1 Dokumen	167.163.829	1 Dokumen	44.780.000
TOTAL			9.002.963.380		7.193.426.654				9.002.963.380		7.193.426.654

2.3.ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai. Pada pasal 3 Peraturan Daerah tersebut telah dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Inspektorat, 18 (delapan belas) Dinas Daerah, 5 (lima) Badan, 1 (satu) Satuan, dan 7 (tujuh) Kecamatan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai merupakan salah satu badan daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (BAPPEDA) adalah badan yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai masuk ke dalam klasifikasi tipe A, yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang. Masing-masing bidang di Bappeda Kota Dumai terdiri atas 3 (tiga) subbidang, sedangkan sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah Kota Dumai. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) atau perencanaan tahunan;
2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, politik, *bottom up top down* dan partisipatif;

3. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergis perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan nasional, perencanaan provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/unit kerja lainnya;
4. Pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, kinerja perangkat daerah;
5. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, bimbingan dan pengendalian perencanaan serta pelaporan pembangunan daerah;
6. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tahunan dan akhir masa jabatan Walikota, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan perencanaan pembangunan daerah lainnya;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan perencanaan pembangunan daerah;
9. Penyusunan dokumen dan pengendalian Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai (RTRW) dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
10. Penyusunan rencana secara makro kawasan strategis, kawasan khusus, kawasan tumbuh, kawasan kumuh serta dan sejenisnya dalam perencanaan pembangunan daerah;
11. Perumusan kebijakan kerja sama pembangunan dengan daerah lain, lembaga, perguruan tinggi, instansi swasta dalam dan luar negeri;
12. Perumusan penelitian, riset, kajian dan kerjasama pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
13. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penyebaran informasi pembangunan daerah;
14. Penyusunan profil, penyebaran informasi dan publikasi perencanaan pembangunan daerah;
15. Perumusan kebijakan kerjasama daerah dengan badan, lembaga, daerah lain, swasta dan luar negeri;
16. Penyusunan rencana induk, rencana aksi, *Master Plan* serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
17. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi program kegiatan dan penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Pelaksanaan, bimbingan, pengendalian monitoring dan evaluasi kesekretariatan meliputi urusan umum, kepegawaian, program, keuangan dan aset; dan

19. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi Bappeda pada masa yang akan datang, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda sebagai perumus kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi ke arah yang lebih baik sehingga akan menghasilkan informasi dan data yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi;
3. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar bidang dan lintas sektor;
4. Peningkatan capacity building kelembagaan perencana pembangunan;
5. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
6. Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan aksesibel.

2.3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kota , Dumai Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Dumai Tahun 2020

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Non Urusan					Non Urusan					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	100%	2.071.683.880	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	100%	2.387.863.400	
Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Jumlah penyediaan surat menyurat	12 bulan	1.800.000	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Jumlah penyediaan surat menyurat	12 bulan	3.607.200	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	30.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	30.000.000	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kelengkapan administrasi kendaraan dinas	26 unit	44.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kelengkapan administrasi kendaraan dinas	26 unit	55.110.000	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	127.097.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	125.250.000	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	100 unit	64.200.000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	100 unit	84.518.700	
Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	173.806.000	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	199.398.000	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	41.837.600	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	62.873.150	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	12 bulan	38.343.400	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	12 bulan	38.343.400	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	31.576.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	80.160.000	
Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	12 bulan	66.096.280	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	12 bulan	84.264.200	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	733.367.600	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	741.400.000	
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	SKPD	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	12 bulan	132.400.000	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	SKPD	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	12 bulan	162.644.800	

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 bulan	587.160.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 bulan	720.293.950	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	1.468.438.440	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	1.843.891.983	
Pembangunan gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dibangun	0 kegiatan	0	Pembangunan gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 kegiatan	202.000.000	
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 unit	280.000.000	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 unit	300.000.000	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	26 unit	159.720.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	40 unit	202.000.000	
Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	19 unit	199.500.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	30 unit	202.000.000	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	2 unit	194.947.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	3 unit	222.200.000	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	26 Kendaraan	384.271.440	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	26 Kendaraan	415.691.983	
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung/kantor yang direhabilitasi	3 unit	250.000.000	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung/kantor yang direhabilitasi	3 unit	300.000.000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 orang	329.880.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 orang	530.600.000	
Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	20 orang	90.000.000	Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	20 orang	130.600.000	
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 kali	150.000.000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 kali	200.000.000	
Pembinaan mental dan fisik aparatur	SKPD	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani	12 bulan	89.880.000	Pembinaan mental dan fisik aparatur	SKPD	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani	12 bulan	200.000.000	
Program Peningkatan Pengembangan		Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	5 Dokumen	18.500.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan		Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	5 Dokumen	131.110.096	

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11										
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					Capaian Kinerja dan Keuangan					
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	3 dokumen	12.200.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	3 dokumen	70.510.096	
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD	SKPD Jumlah dokumen laporan keuangan	2 dokumen	6.300.000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	2 dokumen	60.600.000	
Wajib					Wajib					
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
Program Perencanaan Tata Ruang		Jumah dokumen tata ruang	2 Dokumen	187.098.100	Program Perencanaan Tata Ruang		Jumah dokumen tata ruang	2 Dokumen	275.000.000	
Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	SKPD	Jumlah dokumen rencana teknis Ruang Kawasan terhadap RTRW	0 dokumen	0	Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	SKPD	Jumlah dokumen rencana teknis Ruang Kawasan terhadap RTRW	0 dokumen	0	
Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	SKPD	Jumlah koordinasi tentang rencana tata ruang	15 kali	128.712.500	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	SKPD	Jumlah koordinasi tentang rencana tata ruang	15 kali	175.000.000	
Survey dan pemetaan	SKPD	Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial permukiman	1 dokumen	58.385.600	Survey dan pemetaan	SKPD	Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial permukiman	1 dokumen	100.000.000	
Program Pemanfaatan Ruang		Persentase peningkatan pemanfaatan ruang	100%	100.000.000	Program Pemanfaatan Ruang		Persentase peningkatan pemanfaatan ruang	100%	100.000.000	
Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	SKPD	Sosialisasi Perda RTRW ke stakeholder terkait	0 stakeholder	0	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	SKPD	Sosialisasi Perda RTRW ke stakeholder terkait	0 stakeholder	0	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	SKPD	Dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan terhadap pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Dumai	1 dokumen	100.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	SKPD	Dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan terhadap pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Dumai	1 dokumen	100.000.000	
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Persentase peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang	100%	38.335.304	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Persentase peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang	100%	150.000.000	
Pengawasan pemanfaatan ruang	SKPD	Pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan oleh pokja pemanfaatan ruang BKPRD Kota Dumai	3 kali	38.335.304	Pengawasan pemanfaatan ruang	SKPD	Persentase pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan oleh pokja pemanfaatan ruang TKPRD Kota Dumai	100%	150.000.000	
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman					Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman					

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11										
Program Pengembangan Perumahan		Persentase kualitas perumahan dan pemukiman	100%	271.542.170	Program Pengembangan Perumahan		Persentase kualitas perumahan dan pemukiman	100%	357.000.000	
Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	SKPD	Jumlah dokumen tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh Kota Dumai	1 dokumen	246.542.170	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	SKPD	Jumlah dokumen tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh Kota Dumai	1 dokumen	357.000.000	
Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	SKPD	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perumahan dan permukiman kumuh ke stakeholder terkait	15 stakeholder	25.000.000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	SKPD	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perumahan dan permukiman kumuh ke stakeholder terkait	15 stakeholder	0	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	240.282.000	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	306.000.000	
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	SKPD	Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	240.282.000	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	SKPD	Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	306.000.000	
Perencanaan					Perencanaan					
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar		Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar; Proporsi usulan masyarakat bidang infrastruktur dan kewilayahan yang diakomodir dalam RKPD	4 Dokumen;30 %	1.120.895.300	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar		Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar; Proporsi usulan masyarakat bidang infrastruktur dan kewilayahan yang diakomodir dalam RKPD	4 Dokumen;30 %	1.169.332.600	
Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	SKPD	Jumlah koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi	10 kali	100.000.000	Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	SKPD	Jumlah koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi	10 kali	100.000.000	
Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	SKPD	Jumlah koordinasi terkait perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	12 bulan	133.773.850	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	SKPD	Jumlah koordinasi terkait perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	12 bulan	133.773.850	

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
pusat pertumbuhan ekonomi										
Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri	1 dokumen	195.038.750	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri	1 dokumen	195.038.750	
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi Kota Dumai yang disusun	1 dokumen	342.100.000	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi Kota Dumai yang disusun	1 dokumen	357.000.000	
Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan	SKPD	Jumlah koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan yang dilaksanakan	5 kali	30.000.000	Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan	SKPD	Jumlah koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan yang dilaksanakan	5 kali	0	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik, sarana dan prasarana	1 dokumen	144.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik, sarana dan prasarana	1 dokumen	146.880.000	
Koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	SKPD	Jumlah koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	10 kali	125.982.700	Koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	SKPD	Jumlah koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	10 kali	144.840.000	
Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan teknis penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta perumahan permukiman di luar kawasan kumuh	1 dokumen	50.000.000	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan teknis penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta perumahan permukiman di luar kawasan kumuh	1 dokumen	91.800.000	
Program Pengembangan data/informasi		Persentase peningkatan data dan informasi terhadap pembangunan daerah	80%	434.586.000	Program Pengembangan data/informasi		Persentase peningkatan data dan informasi terhadap pembangunan daerah	80%	500.000.000	
Sistem Informasi Perencanaan Daerah	SKPD	Jumlah aplikasi yang digunakan	3 aplikasi	279.715.000	Sistem Informasi Perencanaan Daerah	SKPD	Jumlah aplikasi yang digunakan	3 aplikasi	300.000.000	
Penyusunan Data Perencanaan Daerah	SKPD	Jumlah laporan SIPD	1 laporan	154.871.000	Penyusunan Data Perencanaan Daerah	SKPD	Jumlah laporan SIPD	1 laporan	200.000.000	
Program Kerjasama Pembangunan		Persentase peningkatan kerjasama pembangunan daerah	70%	226.576.400	Program Kerjasama Pembangunan		Persentase peningkatan kerjasama pembangunan daerah	70%	230.000.000	
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	SKPD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam	12 bulan	226.576.400	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	SKPD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka	12 bulan	230.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		rangka perencanaan pembangunan daerah					perencanaan pembangunan daerah			
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan		Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan	1 Dokumen	100.792.280	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan		Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan	1 Dokumen	204.000.000	
Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	SKPD	Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPBD Provinsi Riau dan BNPP Pusat	1 dokumen	100.792.280	Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	SKPD	Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPBD Provinsi Riau dan BNPP Pusat	1 dokumen	204.000.000	
Program perencanaan pembangunan daerah		Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD; Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan ; Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA; Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	30 %;12 Dokumen;2 dokumen;10 0 %	1.771.708.309	Program perencanaan pembangunan daerah		Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD; Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan ; Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA; Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	30 %;13 Dokumen;2 dokumen;10 0 %	2.376.856.200	
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	SKPD	Jumlah Forum OPD yang dilaksanakan	1 forum	169.034.100	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	SKPD	Jumlah Forum OPD yang dilaksanakan	1 forum	169.034.100	
Penyusunan rancangan RPJMD	SKPD	Jumlah dokumen RPJMD	1 dokumen	98.749.709	Penyusunan rancangan RPJMD	SKPD	Jumlah dokumen RPJMD	1 dokumen	250.000.000	
Penyusunan rancangan RKPD	SKPD	Jumlah dokumen RKPD dan dokumen Perubahan RKPD yang disusun	2 dokumen	244.368.400	Penyusunan rancangan RKPD	SKPD	Jumlah dokumen RKPD dan dokumen Perubahan RKPD yang disusun	2 dokumen	244.368.400	
Penyelenggaraan musrenbang RKPD	SKPD	Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat nasional	3 kali	274.874.400	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	SKPD	Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat nasional	3 kali	274.874.400	

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	SKPD	Jumlah dokumen LKJIP yang disusun tepat waktu	1 dokumen	213.079.300	Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	SKPD	Jumlah dokumen LKJIP yang disusun tepat waktu	1 dokumen	213.079.300	
Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	SKPD	Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu	1 dokumen	178.700.000	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	SKPD	Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu	1 dokumen	178.700.000	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen evaluasi RKPD	4 dokumen	61.800.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen evaluasi RKPD	4 dokumen	61.800.000	
Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan	SKPD	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	0 kali	0	Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan	SKPD	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	1 kali	170.000.000	
Evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD-PK) dumai	SKPD	Jumlah dokumen pelaporan RAD-PK	1 dokumen	205.756.200	Evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD-PK) dumai	SKPD	Jumlah dokumen pelaporan RAD-PK	-	-	
Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals	SKPD	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s	1 dokumen	170.235.000	Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals	SKPD	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s	1 dokumen	237.000.000	
Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	SKPD	Jumlah dokumen pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	1 dokumen	155.111.200	Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	SKPD	Jumlah dokumen pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	1 dokumen	198.000.000	
					Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus	SKPD	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus	1 dokumen	200.000.000	
					Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kelurahan	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan kelurahan	1 dokumen	180.000.000	
Program perencanaan pembangunan ekonomi		Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi; Proporsi usulan masyarakat bidang	2 Dokumen; 30 %	279.407.955	Program perencanaan pembangunan ekonomi		Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi; Proporsi usulan masyarakat bidang	2 Dokumen; 30 %	290.543.745	

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		ekonomi yang diakomodir dalam RKPD					ekonomi yang diakomodir dalam RKPD			
koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 dokumen	188.864.210	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 dokumen	200.000.000	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan ekonomi	1 dokumen	90.543.745	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan ekonomi	1 dokumen	90.543.745	
Program perencanaan sosial dan budaya		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya ; Proporsi usulan masyarakat bidang sosial dan budaya yang diakomodir dalam RKPD	5 Dokumen;30 %	780.380.200	Program perencanaan sosial dan budaya		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya ; Proporsi usulan masyarakat bidang sosial dan budaya yang diakomodir dalam RKPD	5 Dokumen;30 %	933.112.736	
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1 dokumen	185.368.200	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1 dokumen	198.000.000	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya	1 dokumen	104.343.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya	1 dokumen	158.000.000	
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	1 dokumen	187.869.000	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	1 dokumen	235.412.736	
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur Pemerintahan	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur	1 dokumen	170.746.000	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur Pemerintahan	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur	1 dokumen	178.500.000	
Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan SDM	SKPD	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	1 dokumen	132.054.000	Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan SDM	SKPD	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	1 dokumen	163.200.000	
Administrasi Pemerintahan					Administrasi Pemerintahan					

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting	
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
11											
Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan informasi pemerintah daerah	90%	79.300.000	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan informasi pemerintah daerah	90%	90.000.000		
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	SKPD	Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan	90%	79.300.000	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	SKPD	Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan	90%	90.000.000		
Pengawasan					Pengawasan						
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Persentase peningkatan serapan realisasi anggaran Kota Dumai	90%	159.720.000	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Persentase peningkatan serapan realisasi anggaran Kota Dumai	90%	0		
Evaluasi realisasi anggaran	SKPD	Jumlah dokumen TEPR yang disusun	4 dokumen	159.720.000	Evaluasi realisasi anggaran	SKPD	Jumlah dokumen TEPR yang disusun	0 dokumen	-		
Keuangan					Keuangan						
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	23.808.800	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	30.000.000		
Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	SKPD	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	23.808.800	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	SKPD	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	30.000.000		
				TOTAL					TOTAL	11.905.310.760	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa :

1. Seluruh program dan kegiatan pada rancangan awal telah adalah 19 program dengan 66 kegiatan, sesuai dengan hasil analisis kebutuhan mengalami perubahan menjadi 18 program dengan 63 kegiatan;
2. Pagu indikatif Bappeda pada Tahun 2020 berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2020 adalah berjumlah Rp. 9.702.935.138, berdasarkan hasil analisis kebutuhan total pagu yang dibutuhkan pada tahun 2020 berjumlah Rp. 11.905.310.760,-, mengalami kenaikan 22,7 %.

2.3. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelahan usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan penelahaan dari usulan masyarakat atau kelompok masyarakat, asosiasi, LSM, perguruan tinggi dan stakeholder lainnya yang ditujukan kepada perangkat daerah khususnya ketika pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RKPD.

Penyampaian usulan masyarakat dalam rangka penyusunan RKPD 2020 disampaikan pada saat :

1. Musyawarah RT dilaksanakan pada Minggu III Januari 2019;
2. Musrenbang RKPD di Kelurahan dilaksanakan pada Minggu IV Januari sampai dengan Minggu II Februari 2019;
3. Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan pada Minggu III sampai dengan Minggu IV Februari 2019;
4. Forum Perangkat Daerah dilaksanakan pada Minggu II Maret 2019;
5. Musrenbang RKPD di Tingkat Kota dilaksanakan pada Minggu III Maret 2019.

Dari rangkaian pelaksanaan kegiatan diatas tidak ada usulan masyarakat yang ditujukan kepada Bappeda Kota Dumai.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
2. Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja.
3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan.
4. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.
5. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan pegawai.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dirumuskan Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai yaitu Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Untuk mengukur tercapai atau tidaknya tujuan ini maka ditetapkan “tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang menengah dan tahunan” sebagai indikator tujuan. Adapun sasaran yang dirumuskan untuk mencapai tujuan tersebut adalah meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah, dengan 3 (tiga) indikator/tolak ukur yaitu: (1) proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD; (2) tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA; dan (3) penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD. Kesesuaian antara Visi

dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Dumai serta target yang akan dicapai pada 2020 dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut ini :

Tabel 3.1
Visi, Misi, Target Tujuan dan Sasaran 2020

Visi : Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021
Misi : Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun 2020
1	2	3	4
Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas		Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan	Ada
	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	30%
		Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	2 dokumen
		Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Dumai pada Tahun 2020 disajikan dalam bentuk tabel pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan

Program	Kegiatan	Keterangan
1	2	3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	
	Penyediaan alat tulis kantor	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
	Penyediaan makanan dan minuman	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	

Program	Kegiatan	Keterangan
1	2	3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan gedung kantor	
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	
	Pembinaan mental dan fisik aparatur	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	
Program Perencanaan Tata Ruang	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	
	Survey dan pemetaan	
Program Pemanfaatan Ruang	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengawasan pemanfaatan ruang	
Program Pengembangan Perumahan	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	
	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	
	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	
	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
	Koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	
	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	
Program Pengembangan data/informasi	Sistem Informasi Perencanaan Daerah	
	Penyusunan Data Perencanaan Daerah	
Program Kerjasama Pembangunan	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	
Program perencanaan pembangunan daerah	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	
	Penyusunan rancangan RPJMD	
	Penyusunan rancangan RKPD	
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	
	Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	
	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
	Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan	
	Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals	
	Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	
	Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kelurahan	
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Monitoring, evaluasi dan pelaporan		
Program perencanaan sosial dan budaya	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	

Program	Kegiatan	Keterangan
1	2	3
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur Pemerintahan	
	Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan SDM	
Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Bappeda Kota Dumai pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

No Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1			Wajib								
1	3		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	3	31	Program Perencanaan Tata Ruang		Jumah dokumen tata ruang	1 Dokumen	275.000.000		1 Dokumen	447.372.000	
1	3	31	10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	SKPD	Jumlah koordinasi tentang rencana tata ruang	15 kali	175.000.000	APBD	15 kali	249.696.000
1	3	31	13	Survey dan pemetaan	SKPD	Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial permukiman	1 dokumen	100.000.000	APBD	1 dokumen	197.676.000
1	3	32		Program Pemanfaatan Ruang		Persentase peningkatan pemanfaatan ruang	100%	100.000.000		100%	161.262.000
1	3	32	9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	SKPD	Dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan terhadap pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Dumai	1 dokumen	100.000.000	APBD	1 dokumen	161.262.000
1	3	33		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Persentase peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang	100%	150.000.000		100%	212.241.600
1	3	33	5	Pengawasan pemanfaatan ruang	SKPD	Persentase pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan oleh pokja pemanfaatan ruang TKPRD Kota Dumai	100%	150.000.000	APBD	100%	212.241.600
1	4			Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman							
1	4	15		Program Pengembangan Perumahan		Persentase kualitas perumahan dan pemukiman	100%	357.000.000		100%	364.140.000
1	4	15	3	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	SKPD	Jumlah dokumen tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh Kota Dumai	1 dokumen	357.000.000	APBD	1 dokumen	364.140.000
1	4	15	4	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	SKPD	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perumahan dan permukiman kumuh ke stakeholder terkait	0 stakeholder	-	-	0 stakeholder	-
3											

No Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 3	Perencanaan								
3 3 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar		Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar; Proporsi usulan masyarakat bidang infrastruktur dan kewilayahan yang diakomodir dalam RKPD	4 Dokumen;30 %	1.169.332.600			4 Dokumen;35 %	1.208.944.800
3 3 19 2	Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	SKPD	Jumlah koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi	10 kali	100.000.000	APBD		10 kali	104.040.000
3 3 19 4	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	SKPD	Jumlah koordinasi terkait perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	12 bulan	133.773.850	APBD		12 bulan	141.494.400
3 3 19 5	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri	1 dokumen	195.038.750	APBD		1 dokumen	208.080.000
3 3 19 9	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi Kota Dumai yang disusun	1 dokumen	357.000.000	APBD		1 dokumen	364.140.000
3 3 19 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik, sarana dan prasarana	1 dokumen	146.880.000	APBD		1 dokumen	149.817.600
3 3 19 12	Koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	SKPD	Jumlah koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	10 kali	144.840.000	APBD		10 kali	147.736.800
3 3 19 13	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan teknis penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta perumahan permukiman di luar kawasan kumuh	1 dokumen	91.800.000	APBD		1 dokumen	93.636.000
3 3 15	Program Pengembangan data/informasi		Persentase peningkatan data dan informasi terhadap pembangunan daerah	80%	500.000.000			90%	572.220.000
3 3 15 7	Sistem Informasi Perencanaan Daerah	SKPD	Jumlah aplikasi yang digunakan	3 aplikasi	300.000.000	APBD		3 aplikasi	364.140.000
3 3 15 9	Penyusunan Data Perencanaan Daerah	SKPD	Jumlah laporan SIPD	1 laporan	200.000.000	APBD		1 laporan	208.080.000

No Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 3 16	Program Kerjasama Pembangunan		Persentase peningkatan kerjasama pembangunan daerah	70%	230.000.000			80%	257.914.536
3 3 16 4	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	SKPD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah	12 bulan	230.000.000	APBD		12 bulan	257.914.536
3 3 17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan		Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan	1 Dokumen	204.000.000			1 Dokumen	208.080.000
3 3 17 3	Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	SKPD	Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPBD Provinsi Riau dan BNPP Pusat	1 dokumen	204.000.000	APBD		1 dokumen	208.080.000
3 3 21	Program perencanaan pembangunan daerah		Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD; Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan ; Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA; Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	30 %;13 Dokumen;2 dokumen;100 %	2.376.856.200			35 %;17 Dokumen;3 dokumen;100 %	2.408.102.720
3 3 21 1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	SKPD	Jumlah Forum OPD yang dilaksanakan	1 forum	169.034.100	APBD		1 forum	171.314.100
3 3 21 5	Penyusunan rancangan RPJMD	SKPD	Jumlah dokumen RPJMD	1 dokumen	250.000.000	APBD		1 dokumen	130.000.000
3 3 21 8	Penyusunan rancangan RKPD	SKPD	Jumlah dokumen RKPD dan dokumen Perubahan RKPD yang disusun	2 dokumen	244.368.400	APBD		2 dokumen	247.778.400
3 3 21 9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	SKPD	Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat nasional	3 kali	274.874.400	APBD		3 kali	288.374.400

No Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 3 21 11	Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	SKPD	Jumlah dokumen LKJIP yang disusun tepat waktu	1 dokumen	213.079.300	APBD		2 dokumen	223.977.720
3 3 21 12	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	SKPD	Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu	1 dokumen	178.700.000	APBD		2 dokumen	254.393.100
3 3 21 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen evaluasi RKPD	4 dokumen	61.800.000	APBD		5 dokumen	87.265.000
3 3 21 15	Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan	SKPD	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	1 kali	170.000.000	APBD		1 kali	170.000.000
3 3 21 21	Evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD-PK) dumai	SKPD	Jumlah dokumen pelaporan RAD-PK	-	-	-		-	-
3 3 21 24	Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals	SKPD	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s	1 dokumen	237.000.000	APBD		1 dokumen	237.000.000
3 3 21 25	Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	SKPD	Jumlah dokumen pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	1 dokumen	198.000.000	APBD		1 dokumen	198.000.000
3 3 21 27	Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus	SKPD	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus	1 dokumen	200.000.000	APBD		1 dokumen	210.000.000
3 3 21 28	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kelurahan	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan kelurahan	1 dokumen	180.000.000	APBD		1 dokumen	190.000.000
3 3 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi		Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi; Proporsi usulan masyarakat bidang ekonomi yang diakomodir dalam RKPD	2 Dokumen; 30 %	290.543.745			2 Dokumen; 35 %	343.332.000
3 3 22 4	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 dokumen	200.000.000	APBD		1 dokumen	208.080.000
3 3 22 8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan ekonomi	1 dokumen	90.543.745	APBD		1 dokumen	135.252.000

No Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 3 23	Program perencanaan sosial dan budaya		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya ; Proporsi usulan masyarakat bidang sosial dan budaya yang diakomodir dalam RKPD	6 Dokumen;30 %	933.112.736			6 Dokumen;35 %	952.794.991
3 3 23 3	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1 dokumen	198.000.000	APBD		1 dokumen	202.878.000
3 3 23 4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya	1 dokumen	158.000.000	APBD		1 dokumen	161.262.000
3 3 23 5	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	1 dokumen	235.412.736	APBD		1 dokumen	240.120.991
3 3 23 6	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur Pemerintahan	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur	1 dokumen	178.500.000	APBD		1 dokumen	182.070.000
3 3 23 7	Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	SKPD	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	1 dokumen	163.200.000	APBD		1 dokumen	166.464.000
3 1	Administrasi Pemerintahan								
3 1 35	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan informasi pemerintah daerah	90%	90.000.000			90%	100.000.000
3 1 35 3	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	SKPD	Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan	90%	90.000.000	APBD		90%	100.000.000
4									
4 7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
4 7 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	306.000.000			1 dokumen	312.120.000

No Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4 7 15 5	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	SKPD	Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	306.000.000	APBD		1 dokumen	312.120.000
3									
3 2	Pengawasan								
3 2 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Persentase peningkatan serapan realisasi anggaran Kota Dumai	0%	-			0%	-
3 2 20 26	Evaluasi realisasi anggaran	SKPD	Jumlah dokumen TEPR yang disusun	0 dokumen	-	-		0 dokumen	-
3 4	Kuangan								
3 4 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	30.000.000			90%	30.000.000
3 4 17 110	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	SKPD	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	30.000.000	APBD		90%	30.000.000
0	Non Urusan								
0 1									
0 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	100%	2.387.863.400			100%	2.470.000.000
0 1 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Jumlah penyediaan surat menyurat	12 bulan	3.607.200	APBD		12 bulan	3.620.000
0 1 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	30.000.000	APBD		12 bulan	30.000.000
0 1 1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kelengkapan administrasi kendaraan dinas	26 unit	55.110.000	APBD		27 unit	55.230.000
0 1 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	125.250.000	APBD		12 Bulan	125.550.000
0 1 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	100 unit	84.518.700	APBD		104 unit	84.710.000
0 1 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	199.398.000	APBD		12 bulan	199.800.000
0 1 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	62.873.150	APBD		12 bulan	63.000.000

No Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0 1 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	12 bulan	38.343.400	APBD		12 bulan	111.000.000
0 1 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	80.160.000	APBD		12 bulan	80.380.000
0 1 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	12 bulan	84.264.200	APBD		12 bulan	84.450.000
0 1 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	741.400.000	APBD		12 bulan	747.360.000
0 1 1 19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	SKPD	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	12 bulan	162.644.800	APBD		12 bulan	162.900.000
0 1 1 20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD	Jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 bulan	720.293.950	APBD		12 bulan	722.000.000
0 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	1.843.891.983			100%	1.175.019.823
0 1 2 3	Pembangunan gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 kegiatan	202.000.000	APBD		1 kegiatan	200.000.000
0 1 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 unit	300.000.000	APBD		0 unit	-
0 1 2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	40 unit	202.000.000	APBD		40 unit	200.000.000
0 1 2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	30 unit	202.000.000	APBD		30 unit	200.000.000
0 1 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	3 unit	222.200.000	APBD		3 unit	220.000.000
0 1 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	26 Kendaraan	415.691.983	APBD		27 Kendaraan	355.019.823
0 1 2 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung/kantor yang direhabilitasi	3 unit	300.000.000	APBD		0 unit	-
0 1 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 orang	530.600.000			20 orang	531.212.000
0 1 5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	20 orang	130.600.000	APBD		20 orang	131.212.000
0 1 5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 kali	200.000.000	APBD		1 kali	200.000.000

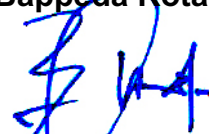
No Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0 1 5 4	Pembinaan mental dan fisik aparatur	SKPD	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani	12 bulan	200.000.000	APBD		12 bulan	200.000.000
0 1 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	5 Dokumen	131.110.096			5 Dokumen	132.176.298
0 1 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	3 dokumen	70.510.096	APBD		3 dokumen	70.976.298
0 1 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	2 dokumen	60.600.000	APBD		2 dokumen	61.200.000
			TOTAL		11.905.310.760				11.886.932.768

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kota Dumai Tahun 2020, merupakan penjabaran pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Strategis Bappeda Kota Dumai Tahun 2016 - 2021. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 serta hasil analisis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018, Dokumen Renja Tahun 2020 mendukung pelaksanaan rencana kerja tahun keempat Walikota Dumai periode tahun 2016-2021 yang merupakan tahun *Tahap Penguatan yakni Melakukan penguatan terhadap system, sarana, potensi dan sumber daya pendukung untuk mewujudkan masyarakat Kota Dumai yang makmur dan madani.*

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsi Bappeda, Rencana Kerja Bappeda Kota Dumai tahun 2020 sebagai dokumen rencana operasional Bappeda Kota Dumai pada tahun 2020. Diharapkan dengan pelaksanaan program/kegiatan prioritas dan program/kegiatan pendukung lainnya maka kualitas perencanaan pembangunan Kota Dumai akan semakin baik dan terintegrasi di semua aspek pembangunan.

Kepala Bappeda Kota Dumai,



MUHAMMAD SYAFIE, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650122 199903 1 002



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Tuanku Tambusai Telp. (0765) 440414 Fax. 440415

DUMAI

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA DUMAI

Nomor : 11/Bappeda/2019

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2020

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kota Dumai Tahun 2020, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Bappeda Kota Dumai Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun 2014-2019;
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016 - 2021;
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 23 seri D);
20. Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 32 seri E);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2020

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas :
1. Mengkoordinasikan dengan pihak terkait serta menghimpun bahan-bahan dan data guna penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Dumai Tahun 2020;
 2. Menyusun jadwal kerja kegiatan penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Dumai Tahun 2020 sesuai dengan tahapan-tahap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun;
 4. Menyusun rancangan awal Rencana Kerja;
 5. Menyusun rancangan akhir Rencana Kerja yang selaras dengan rancangan RKPD Kota Dumai Tahun 2020;
 6. Melakukan penetapan Rencana Kerja dengan Peraturan Walikota Dumai.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal, 4 Januari 2019

KEPALA,



MUHAMMAD SYAFIE, S.Sos.M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630614 198803 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Bappeda Kota
Dumai
Nomor : 11/Bappeda/2019
Tanggal : 4 Januari 2019

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MUHAMMAD SYAFIE, S.Sos, M.Si	KEPALA BADAN PEMBANGUNAN DAERAH	KETUA
2.	Drs. BUDHI HASNUL, M.Si	SEKRETARIS	ANGGOTA
3.	MUNADI AHMADI, ST, M.Sc, M.Eng	KEPALA BIDANG PERENCANAAN EVALUASI DAN LITBANG	ANGGOTA
4.	M. PAIZAL, S.Pi, M.Sc	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
5.	HAMOD ISSFAD, S.Pi, M.Si	KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	ANGGOTA
6.	MUKHLIS SUZANTRI, S.Hut,T, MT	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	ANGGOTA
7.	FAHMI ABDULLAH ABIDIN, SP, MT	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN	ANGGOTA

KEPALA,



MUHAMMAD SYAFIE, S.Sos.M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630614 198803 1 001